

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa peran Indonesia sebagai middle power dalam perspektif Realisme, Neo-Liberalisme dan Konstruktivisme. Middle power adalah negara dengan pengaruh menengah yang memiliki posisi strategis dalam sistem internasional, karena dapat menerapkan berbagai kebijakan yang membedakan identitas mereka tanpa harus bergantung pada keputusan great power. Berdasarkan sumber daya power yang dimiliki dan praktik kebijakan luar negeri, middle power dapat diklasifikasikan menjadi: Enforcer (hard power) dalam perspektif Realisme, misalnya Cina dan Rusia; Assembler (perilaku diplomatik) dalam perspektif Neo-Liberalisme, seperti Brazil, India, Mexico, Afrika Selatan dan Turki; dan juga Advocator (soft power) dalam perspektif Konstruktivisme, diantaranya Australia, Kanada dan Korea Selatan.

Tesis ini berargumen bahwa sejak kemerdekaan pada 1945, Indonesia telah menjalankan peran middle power Assembler di regional Asia Tenggara dengan konsisten. Pada masa pemerintahan Sukarno, Indonesia telah mewakili negara-negara dunia ketiga dalam ranah internasional dengan memelopori Konferensi Asia-Afrika dan gerakan non-blok, serta menolak keberadaan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme di Asia Tenggara. Sedangkan pada masa Soeharto, Indonesia ikut serta dalam mendirikan ASEAN, meningkatkan intensitas konsultasi antar negara regional berdasarkan ASEAN Way dan prinsip non-intervensi. Walaupun demikian, perhatian Indonesia terhadap ketimpangan ekonomi dan politik domestik di awal Era Reformasi telah menyebabkan kekosongan kepemimpinan regional ASEAN. Setelah itu sejak pemerintahan Yudhoyono pada 2004, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan peran middle power ganda sebagai Assembler dan Advocator dengan memperlebar kerjasama regional dan mempromosikan demokrasi dalam forum-forum multilateral. Akhirnya, kemenangan Jokowi dalam pemilihan umum Indonesia 2014 juga berdampak secara regional.

Kata Kunci: Middle Power, Indonesia, Enforcer, Assembler, Advocator